

**PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PERKARA KRIMINAL UNTUK
MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA**

Imam Fahmi Abror Shobirin¹⁾, Haniyah, S.H., M.H.²⁾, Dr. Pratolo Saktiawan, SH., M.H.³⁾,
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: imamabror123@gmail.com

No. Telp: +62 821-3567-2623

Submitted 13 January 2025

Accepted 22 January 2025

Published 23 January 2025

ABSTRACT

Unit Identifikasi dalam evaluasi berfungsi sebagai unit teknis yang menilai efektivitas suatu metode dalam pelaksanaannya. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun laporan keuangan dan membantu memahami serta mengatasi penyebab permasalahan yang muncul. Pengetahuan psikologis juga menjadi elemen penting dalam penanganan kejahatan, karena membantu memahami perilaku individu. Pemahaman psikologis ini memungkinkan untuk memperlakukan orang lain dengan lebih manusiawi, meskipun penegakan hukum terhadap kejahatan tetap merupakan kewajiban normatif dari Departemen Kepolisian. Penegakan hukum ini didasarkan pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 memberikan pedoman dan pedoman untuk menerapkan teknik kriminalistik di TPK dan melakukan tes laboratorium kasus-kasus kejahatan di Laboratorium Forensik Polisi Indonesia. Melalui peraturan ini, proses identifikasi kepolisian melibatkan berbagai aspek, termasuk kedokteran kepolisian dan pengujian di laboratorium forensik. Tujuan utamanya adalah mendukung tugas kepolisian dalam Teknis di TKP dan analisis terhadap barang bukti ditemukan adalah penegakan hukum secara efektif dan efisien, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari penegakan hukum adil dan manusiawi.

Kata kunci: laboratorium forensik.tindak pidana.kriminal

Pendahuluan**1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang diikat oleh hukum, dengan semua tindakan, termasuk hukuman dan hukuman, membutuhkan penegakan hukum yang jelas. Hukum adalah alat utama untuk mempengaruhi ketertiban sosial dalam kehidupan dan masyarakat lokal, memastikan bahwa semua tindakan sejalan dengan aturan hukum. Ini tercermin dalam konstitusi 1945, yang menyatakan Indonesia sebagai negara yang diikat oleh hukum.

Hukum Acara Pidana adalah cabang hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil, termasuk prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Di Indonesia, Hukum Acara Pidana diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan hukum pidana di negara ini.

Artikel ini secara khusus membahas peran penting pengumpulan pajak dalam konteks hukum di Indonesia, dengan fokus pada upaya memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Pengumpulan pajak yang adil sangat penting karena membantu menjamin keadilan dan legalitas dalam sistem perpajakan. Dalam hukum pajak, proses menangani masalah yang berkaitan dengan keadilan pajak merupakan elemen kunci, terutama ketika muncul isu-isu yang menuntut keahlian teknis dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Proses ini juga melibatkan penanganan keluhan atau sengketa yang berkaitan dengan apakah pajak tersebut dikumpulkan secara adil atau tidak, yang merupakan aspek penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan

Dengan demikian, hukum acara pidana dan hukum pajak memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Prosedur yang tepat dalam penegakan hukum melibatkan tidak hanya memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil tetapi juga bahwa hak-hak individu dan entitas dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Forensik adalah bidang studi yang menyediakan pengetahuan dan metode untuk penegakan hukum, dengan peran yang signifikan dalam menafsirkan berbagai dokumen hukum. Laboratorium forensik tidak hanya terlibat dalam analisis fisik bukti, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti patologi, biologi, toksikologi, kriminalistik, serta etika forensik, antropologi, jurisprudensi, dan psikologi.

Dengan cakupan yang luas ini, forensik berfungsi sebagai alat yang sangat berharga untuk memahami berbagai aspek kehidupan dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, patologi forensik membantu dalam menentukan penyebab kematian, sementara biologi forensik dapat digunakan untuk menganalisis DNA dan jejak biologis lainnya. Toksikologi forensik penting untuk mendeteksi racun atau zat berbahaya dalam tubuh, sedangkan antropologi forensik memberikan wawasan tentang identifikasi sisa-sisa manusia berdasarkan fitur-fitur fisik.

Selain itu, etika forensik memastikan bahwa semua prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar hukum dan moral yang berlaku. Kriminalistik berfokus pada teknik-teknik penyidikan dan rekonstruksi kejadian, sementara jurisprudensi berkaitan dengan penerapan hukum dalam konteks forensik. Psikologi forensik memberikan pemahaman tentang perilaku kriminal dan kondisi mental pelaku atau saksi.

Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu ini, laboratorium forensik membantu memperjelas fakta-fakta dan memberikan informasi yang diperlukan untuk proses hukum, memastikan bahwa setiap aspek dari kasus kriminal dapat dianalisis secara menyeluruh dan akurat.

Di Indonesia, Penggunaan laboratorium forensik diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, seperti Hukum KAHAP tahun 1981 dan Undang-Undang ITE tahun 2008, yang mengkategorikan teknologi elektronik sebagai objek penting. Selain itu, Hukum Kapolri tahun 2009 menetapkan tujuan dan persyaratan pendirian laboratorium kriminal. Peraturan ini memastikan bahwa laboratorium forensik beroperasi sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan untuk mendukung proses investigasi dan penegakan hukum.

Laboratorium forensik juga berperan dalam menyediakan keterangan ahli dan petunjuk melalui analisis ilmiah. Namun, penggunaan laboratorium forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya forensik dalam Proses hukum melibatkan seluruh aspek dalam komunitas hukum serta peran aparat penegak hukum. Kedua elemen ini berkontribusi dalam menjalankan dan menjaga sistem hukum, memastikan bahwa semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Baik di dalam komunitas hukum maupun di kalangan aparat penegak hukum, setiap langkah dalam proses hukum harus dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap undang-undang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam pengembangan laboratorium forensik di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah- langkah nyata untuk memperkuat peran laboratorium Fokusnya adalah pada penegakan hukum di Indonesia. Ini mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur laboratorium, pelatihan tenaga ahli forensik, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan peran krusial forensik dalam mendukung keadilan.

Salah satu isu dalam mengungkap tindak pidana adalah kekurangan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku.

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib, analisis forensik, seperti deteksi racun arsenik, memiliki peran krusial. Namun, berbagai hambatan membuat proses penyelidikan kasus ini menjadi rumit. Faktor-faktor seperti kurangnya kerja sama antar lembaga, keterbatasan teknologi pada waktu itu, dan adanya dugaan campur tangan politik.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antar lembaga terkait, seperti kepolisian, laboratorium forensik, dan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, investasi dalam infrastruktur laboratorium forensik, termasuk pengadaan peralatan analisis terkini, penting untuk memastikan bahwa proses analisis bukti dapat dilakukan dengan akurat dan efisien.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya forensik juga menjadi langkah penting dalam memperkuat peran laboratorium forensik. Edukasi tentang forensik dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya bukti forensik dalam proses peradilan dan memberikan dukungan lebih besar terhadap pengembangan laboratorium forensik di Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran laboratorium forensik dalam penegakan hukum di Indonesia dapat diperkuat, sehingga proses pengungkapan tindak pidana dapat berjalan lebih efektif dan akurat. Lebih jauh, upaya ini juga diharapkan dapat tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana di Indonesia

Laboratorium forensik membantu mengidentifikasi pelaku, mengungkap modus operandi, dan menghubungkan bukti-bukti dengan pelaku. Proses ini memerlukan ketelitian dan keahlian khusus serta peralatan canggih. Keberadaan laboratorium forensik membantu mengurangi kesalahan dalam identifikasi pelaku dan memberikan bukti yang kuat di pengadilan. Penggunaan teknologi canggih juga mempercepat proses pengungkapan tindak pidana.

Secara keseluruhan, kemajuan dalam bidang forensik dan laboratorium forensik yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif. Teori-teori seperti deterrence, incapacitation, rehabilitation, dan retribution juga mendasari pentingnya pengungkapan tindak pidana dan peran laboratorium forensik dalam sistem peradilan.

Dalam praktiknya, laboratorium forensik tidak hanya menjadi elemen penting dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga berperan dalam menerapkan teori-teori hukum dengan menyediakan bukti yang kuat dan akurat untuk memperkuat proses peradilan. Sehingga, peran laboratorium forensik tidak sekadar terbatas pada upaya penegakan hukum, melainkan juga sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip teori-teori hukum dalam sistem peradilan.

Dalam proses pengungkapan tindak pidana, laboratorium forensik menggunakan beragam metode ilmiah untuk menganalisis bukti-bukti yang ada. Sebagai contoh, pada kasus kriminalitas digital, laboratorium forensik akan memanfaatkan teknik forensik digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti-bukti elektronik yang relevan. Hal ini menjadikan laboratorium forensik sebagai penggerak utama dalam mengungkap tindak pidana, serta Teks tersebut berpendapat bahwa proses penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, laboratorium forensik juga memiliki peran vital dalam memberikan keterangan ahli di pengadilan, yang didasarkan pada analisis ilmiah yang teliti. Keterangan ahli ini menjadi sangat penting dalam proses peradilan karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan obyektif. Dengan memberikan keterangan ahli yang akurat, laboratorium forensik turut membantu memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laboratorium forensik juga berperan dalam memastikan bahwa bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) diproses dan disimpan dengan benar, agar tidak mengalami

kerusakan atau hilang. Mereka juga memberikan saran tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat bukti-bukti

Laboratorium forensik memainkan peran penting dalam peradilan dan penegakan hukum. Melalui analisis ilmiah yang teliti, mereka memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan objektif. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan secara efektif dalam sistem peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik dalam melaksanakan penelitian dengan judul “PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PERKARA KRIMINAL UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi ini mengeksplorasi peran jamur dan laboratorium forensik dalam mendeteksi masuk yang tidak sah berdasarkan peraturan yurisdiksi yang relevan
2. Eksistensi Ilmu Forensik Dalam Proses Peradilan Pidana

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui fungsi dan peran laboratorium forensik dalam pemeriksaan suatu tindak pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui eksistensi dari ilmu forensik dalam proses peradilan pidana

1.4 Manfaat Penelitian

Kualitas penelitian mengacu pada kemampuan penelitian untuk dievaluasi secara tepat dan akurat, baik dalam konteks teori maupun praktik. Hal ini berarti bahwa sebuah penelitian harus mampu menghasilkan data dan temuan yang dapat diuji dan dianalisis secara menyeluruh, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang berkualitas tinggi mencakup keandalan metodologi yang digunakan, ketepatan dalam pengumpulan dan analisis data, serta relevansi teoritis dan praktis dari hasil yang diperoleh. Dengan demikian, kualitas penelitian mencerminkan keandalan dan validitas keseluruhan dari proses dan hasil penelitian tersebut.

a. Secara Teoritis

Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dalam pengembangan hukum tingkat tersier, serta memahami dan menganalisis peran laboratorium forensik di sektor pertahanan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fungsi dan kontribusi laboratorium forensik dalam mendukung sistem pertahanan negara.

b. Secara Praktis

Studi ini berkontribusi secara signifikan pada proses penelitian melalui literatur forensik, terutama dalam menangani masalah yang kompleks, dan melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, dapat menjelaskan dan mengkonfirmasi berbagai aspek yang terkait dengan metode konvensional. Ilmu forensik memungkinkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti, sehingga dapat memberikan petunjuk yang jelas dan obyektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi sumber pencerahan bagi pihak penegak hukum dalam menyusun fakta dan menyelesaikan kasus-kasus yang rumit. Hasilnya diharapkan dapat membantu mencapai keadilan yang lebih baik dalam sistem peradilan.

Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan status melibatkan memeriksa penerapan aturan yang terkait dengan tingkat bahasa.
2. Pendekatan konseptual adalah metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep hukum dalam teori dan praktek.

3.2. Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dengan laboratorium forensik digital memiliki peran vital dalam mengungkap kejahatan di dunia maya. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik memberikan panduan bagi laboratorium forensik dalam membantu proses penyidikan dan penegakan hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan

3. dengan topik penelitian. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang peran laboratorium forensik dalam membantu proses penyidikan dan penegakan hukum

3.3. Teknik Keabsahan data

Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif karena lebih fokus dan melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek, daripada hanya mengamati atau menganalisisnya. Pendekatan ini sering melibatkan mengumpulkan data dari sumber tertentu, menghindari memberikan informasi yang terlalu umum atau tidak relevan dengan subjek.

3.4. Teknik Analisis Data

Dokumen hukum mengalami proses analisis yang bersifat normatif atau kualitatif, di mana semua dokumen hukum yang telah dikumpulkan baik dari sumber primer maupun sekunder dianalisis dan dievaluasi secara menyeluruh dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap teori atau ketentuan hukum dapat disajikan dengan jelas dan ringkas. Dalam analisis ini, setiap dokumen diperiksa dengan detail untuk memastikan bahwa teori dan hukum yang disajikan sesuai dengan konteks dan cakupan studi yang diteliti.

Metode analisis ini memastikan bahwa semua aspek hukum yang diuraikan dipahami dengan baik, serta teori dan prinsip hukum diterjemahkan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami dalam konteks penelitian. Dengan mengorganisasi dan mengevaluasi dokumen secara sistematis, proses ini membantu dalam mengklarifikasi dan memperjelas informasi hukum yang ada, sehingga hasil analisis dapat disajikan dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan studi. Analisis normatif atau kualitatif ini penting untuk menghasilkan interpretasi yang akurat dan menyeluruh terhadap dokumen hukum yang diteliti, serta memastikan bahwa hasil akhir berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan teorinya dalam konteks yang relevan.

Hasil dan Pembahasan**Laboratorium Forensik**

Laboratorium forensik adalah sebuah fasilitas khusus yang dirancang untuk melakukan berbagai jenis analisis forensik dengan menggunakan peralatan dan teknologi terkini. Fungsi utama laboratorium ini adalah untuk mendukung proses penyelidikan kriminal dan peradilan dengan menghasilkan bukti-bukti ilmiah yang kuat dan dapat dipercaya.

Peran laboratorium forensik sangatlah penting dalam mengungkap kebenaran dalam kasus kriminal. Mereka melakukan analisis terhadap bukti fisik seperti uji kimia, analisis DNA, sidik jari, balistik, dan lainnya. Hasil analisis ini digunakan sebagai bukti dalam persidangan untuk memastikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum.

Laboratorium forensik juga membantu dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan menganalisis berbagai aspek dari bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Mereka memberikan informasi penting yang membantu penyidikan dan menentukan arah penyelidikan yang lebih efektif.

Dalam konteks peradilan, laboratorium forensik berperan sebagai penentu fakta yang obyektif dan dapat dipercaya. Mereka bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang ketat untuk memastikan integritas bukti dan hasil analisisnya. Hal ini memastikan bahwa keputusan dalam proses peradilan didasarkan pada fakta yang jelas dan tidak terbantahkan.

Secara keseluruhan, laboratorium forensik memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan dukungan ilmiah yang kritis dalam mengungkap kebenaran. Dalam kasus pidana, sangat penting untuk memahami konsekuensi untuk semua pihak yang terlibat.

Laboratorium forensik merupakan fasilitas yang khusus dirancang dengan peralatan dan teknologi modern untuk melakukan analisis forensik. Tujuan utamanya adalah mendukung penyelidikan kriminal dan sistem peradilan dengan menghasilkan bukti ilmiah yang kuat dan dapat dipercaya. Peran laboratorium ini sangatlah penting dalam mengungkap kebenaran di balik kasus kriminal. Mereka melakukan analisis terhadap berbagai jenis bukti fisik, seperti uji kimia, analisis DNA, sidik jari, balistik, dan lainnya. Hasil analisis ini digunakan sebagai bukti dalam persidangan untuk memastikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum.

Laboratorium forensik juga membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan menganalisis bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Mereka memberikan informasi penting yang membantu alur penyelidikan dan menentukan langkah berikutnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks peradilan, laboratorium forensik bertindak sebagai penentu fakta yang objektif dan dapat dipercaya. Mereka beroperasi sesuai dengan standar dan prosedur yang ketat untuk memastikan keabsahan bukti dan hasil analisisnya. Hal ini memastikan bahwa keputusan di dalam ruang sidang didasarkan pada fakta yang kuat dan tak terbantahkan.

Secara keseluruhan, laboratorium forensik memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan dukungan ilmiah yang kritis dalam mengungkap kebenaran di balik kasus kriminal dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Laboratorium forensik memiliki peran yang krusial dalam menyediakan bukti ilmiah yang penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terkait kasus kriminal. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap berbagai jenis bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau pada korban. Beberapa jenis analisis yang mereka lakukan meliputi uji kimia, analisis DNA, analisis sidik jari, dan analisis balistik.

Analisis kimia membantu dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang ditemukan di tempat kejadian perkara, memberikan petunjuk tentang kronologi kejadian. Analisis DNA digunakan untuk mengonfirmasi identitas korban atau pelaku, dan sering kali

menjadi bukti kunci dalam persidangan. Analisis sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi sidik jari yang ditemukan di TKP dan mencocokkannya dengan database untuk mencari kemungkinan identitas pelaku. Sedangkan analisis balistik membantu dalam mengungkap informasi tentang senjata yang digunakan, jarak tembak, dan arah tembakan.

Hasil analisis yang dilakukan oleh laboratorium forensik sangatlah penting dalam proses peradilan. Hasil analisis ini digunakan oleh jaksa penuntut untuk memperkuat dakwaan mereka, dan juga oleh pengacara pembela untuk membela kliennya. Dengan demikian, laboratorium forensik bukan hanya berperan dalam mengungkap kebenaran di balik kasus kriminal, tetapi juga dalam memastikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum. Laboratorium forensik di Indonesia dilindungi oleh serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan menjamin fungsi serta keberadaan mereka dalam mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Undang-undang tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan kriminal hingga prosedur penggunaan bukti-bukti dari laboratorium forensik di pengadilan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, misalnya, mengatur tugas dan fungsi kepolisian, termasuk penggunaan laboratorium forensik dalam mengungkap kasus-kasus kriminal. Undang-undang ini penting untuk memastikan bahwa Polri memiliki prosedur yang jelas dalam melakukan penyidikan kriminal yang melibatkan laboratorium forensik.

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, meskipun tidak secara langsung terkait dengan laboratorium forensik, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban para ahli forensik yang bekerja di laboratorium tersebut. Hal ini penting agar para ahli forensik dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan sesuai dengan hukum.

Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan kriminal yang melibatkan penggunaan bukti-bukti dari laboratorium forensik.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sampel yang disiapkan oleh sebuah laboratorium dapat dianggap sebagai contoh yang masih digunakan.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 menjelaskan peran penting laboratorium forensik dalam mendukung proses penyelidikan kriminal. Peran ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan awal hingga pelaksanaan analisis di laboratorium. Peraturan tersebut mengalami perubahan pada tahun 2009 untuk memastikan bahwa penelitian laboratorium forensik dilaksanakan dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendirikan dan memelihara laboratorium forensik di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laboratorium forensik dapat mendukung upaya penegakan hukum secara efektif dan efisien di wilayah kerjanya masing-masing. Undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya laboratorium forensik dalam memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal.

Dengan demikian, keberadaan laboratorium forensik yang didukung oleh regulasi yang tepat tidak hanya memungkinkan operasi yang lebih efektif, tetapi juga menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Laboratorium forensik berperan vital dalam memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari TKP dianalisis secara akurat dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dan mencapai keadilan. Regulasi ini memastikan bahwa laboratorium forensik tidak

hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai pilar penting dalam sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

Data Penelitian

Kolaborasi antara polisi dan ahli forensik dalam mengungkap kasus serial killer di wilayah Bekasi-Cianjur adalah langkah yang krusial dalam menyelesaikan kasus kriminal yang kompleks. Polisi bertanggung jawab untuk mengumpulkan berbagai bukti dan informasi terkait kasus tersebut, termasuk rekaman kamera pengawas, barang bukti fisik, dan keterangan saksi. Mereka juga melakukan penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut.

Di sisi lain, ahli forensik memiliki peran penting dalam menganalisis bukti-bukti tersebut secara ilmiah. Mereka menggunakan berbagai teknik forensik, seperti analisis sidik jari, analisis DNA, analisis serologi, atau pemeriksaan kesehatan mental pada tersangka, untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti-bukti tersebut.

Kolaborasi yang baik antara polisi dan ahli forensik memastikan bahwa investigasi dilakukan dengan akurat dan obyektif. Polisi menggunakan informasi dari ahli forensik untuk mengarahkan penyelidikan, sementara ahli forensik memberikan analisis mendalam untuk memahami bukti-bukti tersebut. Dengan kolaborasi ini, diharapkan kasus-kasus kriminal yang kompleks dapat diungkap dengan lebih efektif dan akurat.

Dalam situasi ini, polisi mengambil langkah-langkah investigasi yang sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan, sedangkan ahli forensik memberikan analisis ilmiah yang mendalam untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipahami dengan baik oleh penyidik. Dengan demikian, kolaborasi antara polisi dan ahli forensik menjadi penting dalam menyelesaikan kasus ini.

Kolaborasi antara polisi dan ahli forensik dalam mengungkap kasus kriminal yang kompleks seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa item yang dianalisis secara akurat dan akurat, dan bahwa proses perawatan kesehatan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat, serta keadilan dapat ditegakkan.

Dalam kasus seperti ini, Polisi memainkan peran penting dalam menganalisis bukti yang disajikan oleh polisi. Mereka menggunakan berbagai teknik forensik yang canggih untuk menganalisis bukti-bukti tersebut, seperti analisis DNA, sidik jari, dan pemeriksaan kesehatan mental pada tersangka.

Kolaborasi antara polisi dan ahli forensik merupakan faktor kunci dalam menyelesaikan kasus kriminal yang rumit. Dengan kerjasama yang baik, kedua belah pihak dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya mereka untuk mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat dapat merasa lebih aman.

Hasil Penelitian

Fungsi & Peran Laboratorium Forensik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi Indonesia, berdasarkan Pasal 14 dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, menetapkan kewajiban untuk memberikan bantuan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum. Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yang menggarisbawahi bahwa bantuan merupakan hak untuk memberikan dukungan pada saat-saat yang memerlukan serta pertolongan ketika dibutuhkan.

Dalam konteks ini, laboratorium tersebut didirikan untuk mendukung dan memfasilitasi proses pemberian bantuan. Fungsi laboratorium sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dari Konstitusi Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan merupakan bagian penting dari tanggung jawab

sosial. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa bantuan tidak hanya sebatas kewajiban, tetapi juga hak untuk memastikan bahwa mereka yang memerlukan mendapatkan pertolongan yang diperlukan.

Dengan demikian, laboratorium ini berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa proses pemberian bantuan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup pengelolaan dan koordinasi dalam memberikan dukungan kepada mereka yang memerlukan, serta memastikan bahwa bantuan diberikan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Laboratorium ini membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam konteks bantuan sosial dipenuhi dengan baik, mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Laboratorium forensik memiliki peran penting dalam penyelidikan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai lembaga yang membantu menginterpretasikan bukti hukum. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan dan mengarahkan penegakan hukum. Selain itu, sesuai Pasal 120 KUHAP, pengadilan berhak untuk memerintahkan pelaksanaan tindakan hukum tertentu jika diperlukan. Pengadilan juga memiliki kekuasaan untuk memberikan peringatan atas pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam konteks ini, laboratorium forensik berfungsi mendukung proses peradilan dengan menyediakan analisis ilmiah yang membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku. yang dapat terlibat dalam setiap prosedur pengadilan sebagai berikut:

Tahap Penyelidikan Dalam proses penelitian, peneliti memiliki peran penting dalam mengungkap jawaban dan menemukan fakta-fakta yang relevan. Mereka bekerja sama dengan peneliti lain yang sebelumnya telah memberikan laporan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan kesinambungan dan keakuratan data. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkaya penelitian, karena melibatkan berbagai perspektif dan keahlian yang berbeda. Selain itu, peneliti berusaha mendorong partisipasi dari semua pihak terkait, memastikan bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi tanpa merusak atau mengganggu status quo yang ada.

Dalam dunia penelitian, tanggung jawab utama peneliti mencakup pengumpulan, analisis, dan distribusi fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian. Tugas ini menuntut pengetahuan yang mendalam, keahlian khusus, dan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Peneliti harus mampu mengintegrasikan berbagai data dan informasi untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyebaran hasil penelitian kepada komunitas ilmiah dan publik juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab peneliti, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan dan diaplikasikan secara efektif. Keberhasilan sebuah penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk berkolaborasi, memahami subjek dengan mendalam, dan mengomunikasikan hasilnya dengan jelas.

Tahap Penindakan Tindakan yang diusulkan melibatkan penyediaan layanan yang tidak selalu terlihat langsung pada subjek atau objek tertentu. Proses ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap subjek atau objek, untuk menentukan sifat dan karakteristiknya. Laboratorium Forensik memainkan peran penting dalam mendukung tujuan ini, dengan menyediakan lingkungan teknis yang diperlukan, termasuk penilaian lingkungan, pengambilan sampel, dan analisis yang cermat. Tindakan yang diusulkan tidak akan mengubah atau mempengaruhi subjek itu sendiri, sehingga hasil yang diperoleh tetap sesuai dengan sifat asli dari subjek tersebut. Fungsi utama Laboratorium Forensik adalah untuk mengumpulkan atau mengambil sampel dari subjek atau objek, memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan ketelitian dan

presisi yang tinggi. Dengan demikian, Laboratorium Forensik mengklaim bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis yang lebih komprehensif, tanpa mengganggu integritas subjek atau objek yang diteliti.

Tahap Pemeriksaan Penelitian adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang bertujuan menjelaskan serta mengidentifikasi pola dan kejadian tertentu, serta memperjelas hubungan antara individu dan subjek yang diteliti. Proses ini merupakan kolaborasi yang erat antara peneliti dan Laboratorium Forensik, di mana peneliti dapat bekerja sama dengan ahli, termasuk mereka yang memiliki gangguan mental yang serius, untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau menganalisis subjek di laboratorium. Dalam kolaborasi ini, Laboratorium Forensik menyediakan fasilitas dan keahlian teknis yang diperlukan, sementara peneliti memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari subjek yang diteliti.

Penelitian ini tidak hanya membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang jelas antara berbagai faktor dan fenomena yang diamati. Hasil dari proses ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih lengkap dan akurat tentang subjek yang sedang dipelajari.

Tahap Penyerahan & Penyelesaian berkas perkara Langkah ini merupakan bagian penting dari proses penelitian, di mana peneliti harus menyampaikan ringkasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Hal ini termasuk menyajikan temuan dari para Ahli yang terkait dengan subjek yang diteliti. Laboratorium Forensik, pada gilirannya, akan menyusun laporan penelitian kriminologi yang rinci dan menyerahkannya kepada peneliti. Laporan ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mendukung temuan-temuan yang telah diperoleh dan membantu peneliti dalam menyampaikan Informasi yang dikumpulkan dan dibagikan kepada publik. Dengan demikian, seluruh proses ini memastikan bahwa hasil penelitian disebarluaskan dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat luas, sekaligus mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap penelitian yang dilakukan.

Tahap Penuntutan Laboratorium Forensik Kepolisian memainkan peran penting dalam proses investigasi, dengan memberikan kesempatan bagi Jenderal untuk berkonsultasi dengan penyidik atau ahli dari laboratorium mengenai temuan-temuan kriminologi yang dihasilkan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan ketelitian dalam setiap langkah investigasi, sehingga semua informasi yang diperoleh dapat diandalkan. Selain itu, laboratorium forensik juga berfungsi sebagai pusat rujukan bagi kasus-kasus yang belum terselesaikan, di mana bukti atau data tambahan mungkin diperlukan untuk memajukan penyelidikan. Dengan demikian, kasus-kasus yang membutuhkan analisis lebih lanjut dapat dikirimkan ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan mendalam, memastikan bahwa tidak ada aspek yang terlewatkan dalam proses investigasi. Kerjasama ini antara Jenderal, penyidik, dan Laboratorium Forensik menjadi krusial dalam menjamin bahwa proses penyelidikan berjalan dengan efisien dan Masalah ini ditandai dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. sehingga memberikan landasan yang kuat untuk tindakan lebih lanjut dalam penyelesaian kasus.

Tahap Peradilan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), ada lima jenis bukti yang dianggap valid, yaitu:

Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Keterangan saksi adalah alat bukti dalam kasus pidana yang berupa pernyataan dari saksi terkait peristiwa pidana yang ia alami secara langsung. Ini mencakup disaksikan, didengar, dan dialami oleh saksi

sendiri, dan harus menjelaskan alasan or latar belakang dari pengetahuan terkait peristiwa. Dalam konteks hukum, keterangan ini sangat penting karena memberikan gambaran langsung mengenai kejadian yang sedang diselidiki, sehingga dapat membantu dalam proses penegakan hukum. Validitas dan keandalan dari keterangan saksi bergantung pada seberapa jelas dan mendetail penjelasan yang diberikan serta seberapa kuat alasan yang mendasari pengetahuan saksi tentang peristiwa yang bersangkutan. Hal ini menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu komponen krusial dalam proses pengadilan pidana, karena dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh hakim atau pihak berwenang lainnya.

Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah pernyataan disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Keterangan ini diberikan dalam rangka mendukung proses pemeriksaan perkara pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Ahli memberikan wawasan atau pengetahuan yang mendalam terkait aspek-aspek tertentu yang membutuhkan penjelasan teknis atau spesifik, sehingga membantu pihak berwenang dalam memahami dan menyelesaikan kasus dengan lebih baik. Peran keterangan ahli sangat penting untuk memberikan pandangan yang objektif dan berbasis keahlian, yang dapat memperjelas situasi atau fakta yang ada dalam perkara pidana.

Surat

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat sebagaimana pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas;

Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh pejabat mengenal hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Pernyataan adalah ringkasan perspektif seseorang pada masalah atau situasi tertentu, berdasarkan perspektif mereka sendiri.

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Petunjuk

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat (1), Petunjuk adalah suatu tindakan, kejadian, atau keadaan yang, karena kesesuaiannya dengan elemen-elemen lain dalam sebuah kasus, menunjukkan adanya indikasi bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Selain itu, petunjuk ini juga dapat mengarahkan pada identifikasi pelaku tindak pidana tersebut. Petunjuk-petunjuk ini menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan, karena melalui analisis kesesuaian antara berbagai petunjuk, pihak berwenang dapat membangun gambaran mengenai peristiwa kriminal yang terjadi serta menentukan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Petunjuk-petunjuk ini harus saling mendukung dan relevan satu sama lain agar dapat diakui sebagai bukti yang valid dalam proses hukum.

Keterangan Terdakwa

Dokumen ini mendefinisikan saksi sebagai individu yang memberikan kesaksian mengenai suatu kejahatan, berdasarkan apa yang mereka ketahui dan hubungkan dengan kasus tersebut. Kesaksian dari seorang saksi memiliki peran penting dalam proses penyelidikan, karena menyediakan informasi rinci tentang kejadian kriminal serta konteks yang mengitarinya.

Informasi ini memungkinkan pengadilan dan otoritas terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fakta-fakta dan situasi yang melingkupi kejahatan yang diselidiki.

Dalam proses hukum, kesaksian saksi dianggap sebagai sumber informasi yang sangat berharga, karena dapat membantu menilai apakah suatu tindak kejahatan benar-benar terjadi atau merupakan klaim yang tidak berdasar. Selain itu, kesaksian juga bisa memberikan wawasan tentang motif dan latar belakang tindak kejahatan, yang sangat penting dalam memahami kasus secara keseluruhan.

Keandalan dan akurasi dari kesaksian saksi menjadi faktor krusial dalam memastikan keadilan dalam proses penyelidikan. Untuk mendukung proses ini, Laboratorium Forensik Kepolisian dapat mengembangkan tiga jenis saksi utama—saksi fakta, saksi ahli, dan saksi forensik—dengan memanfaatkan teknik-teknik kriminologi dan analisis laboratorium. Melalui pengujian laboratorium yang dilakukan, saksi-saksi ini dapat menyajikan bukti yang lebih kuat dan mendukung proses penegakan hukum dengan lebih efektif, memastikan bahwa hasil penyelidikan didasarkan pada fakta yang akurat dan dapat dipercaya.

Laboratorium forensik sangat diperlukan guna memecahkan kasus tindak pidana yang dibutuhkan Teknik khusus dalam pembuktian. Dalam hal ini POLRI yang memiliki tugas pokok sebagai pendukung proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka Puslabfor harus mampu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan/penyidik dalam hal pemberian hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kabareskrim Polri, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2017 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Puslabfor Bareskrim Polri dipimpin oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan kriminalistik di tempat kejadian perkara (TKP) serta pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, dengan fokus pada penerapan ilmu forensik untuk tujuan pembuktian ilmiah.

Selain itu, Puslabfor juga bertugas dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan material, fasilitas, dan jasa yang terkait, termasuk instrumen analisis serta pengembangan aplikasi ilmu forensik. Tugas ini bertujuan untuk memastikan mutu pemeriksaan yang tinggi serta melakukan pembinaan teknis fungsi laboratorium forensik kepada Polri dan menyediakan layanan fungsi laboratorium forensik kepada masyarakat. Dengan demikian, Puslabfor berperan penting dalam memastikan kualitas dan keandalan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan untuk mendukung proses hukum dan pelayanan publik. Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik /forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi:

Bidang Dokumen dan uang palsu forensi, Bidang kimia biologi forensik, Bidang narkoba forensik, Bidang fisika forensik, Bidang ballistik metalurgi forensik.

Eksistensi Ilmu Forensik dalam Proses Peradilan Pidana

Eksistensi juga dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Yang lebih dikenal yaitu eksistensi social yang membahas tentang keberadaan manusia itu sendiri. Pada pembahasan ini bukanlah eksistensi manusia melainkan eksistensi prinsip-prinsip KUHAP.

UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak secara eksplisit menyatakan prinsip-prinsip yang mengatur hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebutuhan reformasi KUHAP sangat mendesak untuk memastikan prinsip-prinsip universal dapat diterapkan, membutuhkan waktu dan usaha yang cukup bagi para pemangku kepentingan. KUHAP tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam bahasa sendiri, melibatkan mereka dalam kerangka hukum.. antara lain :

Persamaan kedudukan di depan hukum (equal treatment for everyone before the law)

Prinsip'setara' dalam prinsip ini bertujuan pada Pasal 6 dan 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 16 dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan status.

Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan

Prinsip adalah surat perintah dari pejabat berwenang dan dilakukan menurut hukum. Prinsip sejalan dengan perlindungan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan yang diatur dalam Pasal 3 UDHR. Upaya-upaya paksa dikenal dalam hukum acara pidana pada hakikatnya melanggar hak-hak warga negara.

Asas Praduga Tidak Bersalah

Presumsi tidak bersalah adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, diadili, atau dibawa ke pengadilan harus dianggap tidak berdosa sampai putusan pengadilan menyatakan bersalah dan menjadi final dan mengikat. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Jaksa. Prinsip pertama adalah melindungi hak-hak

warga melalui proses hukum yang tepat, dengan mengecualikan hak untuk memutuskan sifat kejahatan, hak untuk diadili, dan hak untuk diperwakilan di pengadilan.

Pemberian Kompensasi atau Rehabilitasi

Prinsip ini berlaku untuk individu yang telah ditangkap, ditahan, diadili, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kesalahan pribadi, dan membutuhkan sistem hukum yang adil untuk menangani tindakan mereka. Mereka yang sengaja atau karena kelalaian melanggar prinsip ini berhak atas kompensasi dan rehabilitasi dari tingkat penyelidikan. Aspek penting dari KUHAP adalah bahwa tidak ada kerusakan pada sistem hukum yang menegakkan kekuasaannya atau otoritasnya.

Prinsip adjudication which must be carried out quickly, simply and at a low cost in a free, honest and impartial manner, must be realized consistently at all level of justice

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas ini sebenarnya mengandung dua prinsip, yakni tentang peradilan yang bebas dari pengaruh manapun, dan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan tidak mahal.

Prinsip anyone who is involved in a case must be given an opportunity to obtain legal assistance which is provided solely in the interest of his/her defense

KUHAP menerapkan prinsip ini melalui penggunaan kekuasaan pengadilan, yang sangat penting dalam kasus-kasus tertentu. Kekuasaan pengadilan harus dibatasi dan diterapkan dengan adil dalam merawat pasien, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Kekuatan Hukum.

Prinsip a suspect, from his/her arrest and/or detention, must be informed of the accusation against him/her and of the legal basis for what is charged, as well as of his/her rights, including the right to contact and obtain the assistance of legal counsel.

Aparat penegak hukum wajib menginformasikan peristiwa hukum dan pasal apa yang dituduhkan kepada tersangka/terdakwa. Hak untuk mendapatkan informasi tuduhan dan pasal tersebut penting agar tersangka atau terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum yang sesuai. Prinsip-prinsip yang terdapat pada

KUHAP sesuai dengan hak asasi manusia, karna membantu dalam hal proses peradilan atau persidangan

Pembuktian Forensik dalam Proses Peradilan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya mendukung masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan memuaskan. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru yang memerlukan perhatian lebih, seperti kurangnya pengetahuan dan peningkatan tindak pidana. Dalam konteks ini, peran dokter sangat penting; mereka harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan siap memberikan nasihat terkait penerapan hukum yang relevan.

Konsep kesaksian dalam proses hukum menjadi elemen krusial dalam mengungkap kebenaran suatu pernyataan. Tanpa adanya saksi, sulit bagi pengadilan untuk memahami dan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya di balik suatu pernyataan, sehingga pembuktian kebenaran menjadi terhambat. Dalam hal ini, Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa seorang saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang sah jika mereka hanya memiliki dua fakta untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Artinya, saksi harus memiliki bukti yang cukup kuat dan relevan untuk mendukung kebenaran pernyataan yang dibuat dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, kemajuan teknologi dan pengetahuan harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah akurat dan dapat dipercaya, sementara saksi dalam proses hukum harus mampu memberikan

kesaksian yang dapat diandalkan untuk mendukung pengungkapan kebenaran di pengadilan” dalam pasal 184 KUHAP menyatakan:

Alat bukti yang sah ialah:

Keterangan saksi

Keterangan ahli Surat

Petunjuk

Keterangan terdakwa.

Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengartikan keterangan ahli sebagai pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, yang sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam suatu perkara pidana. Keahlian khusus ini adalah pengetahuan yang mendalam dan spesifik yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, sehingga seorang saksi ahli memiliki peran penting dalam proses hukum. Keberadaan alat bukti merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam penegakan hukum, dan di sinilah peran dokter forensik menjadi sangat krusial.

Dalam konteks ini, dokter forensik sering diminta bantuan oleh penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana, terutama melalui pemeriksaan terhadap korban. Tugas ini dilakukan dengan menggunakan keahlian dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh dokter forensik, sehingga mereka dapat memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana suatu tindak pidana terjadi. Dokter forensik bukan hanya sekadar membantu dalam

pengungkapan fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga berperan dalam membantu penegak hukum menemukan kebenaran materiil yang sangat penting dalam proses peradilan pidana.

Dalam dunia hukum dan kedokteran, khususnya dalam bidang forensik, terdapat hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan. Kedua bidang ini bekerja sama untuk mendukung penegakan hukum, terutama dalam proses pembuktian kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Kolaborasi antara hukum dan forensik ini menjadi dasar dalam upaya mencapai keadilan, di mana keahlian medis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengungkapan kebenaran dan pemenuhan rasa keadilan dalam suatu perkara pidana. Keberhasilan dalam penegakan hukum sering kali sangat bergantung pada bukti yang dihasilkan oleh pemeriksaan forensik, menjadikan peran dokter forensik tak tergantikan dalam upaya mencapai kebenaran hukum yang sejati.

Tinjauan Visum et Rapertum

Visum et Repertum adalah istilah etimologis yang digunakan dalam Hukum Kedokteran, sering disebut sebagai Visum. Ini berasal dari bahasa Latin dan berarti "mengunjungi". Visa adalah dokumen yang memberikan informasi tentang kehidupan atau kesehatan seseorang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pengalaman mereka, sedangkan Repertum adalah sebuah dokumen yang meringkas apa yang telah dipelajari dari pengobatan dokter terhadap suatu penyakit.

Visum et Repertum adalah dokumen khusus yang dibuat oleh dokter untuk memberikan perawatan khusus (resmi) untuk kesehatan seseorang, termasuk masalah kehidupan atau kesehatan mereka. Ini adalah dokumen yang memberikan informasi tentang perawatan kesehatan seseorang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan hukum yang relevan, biasanya melalui sidang publik.

Menurut H.M. Soedjatmiko, Visum Et Repertum adalah dokumen khusus yang memberikan informasi tentang perawatan dokter terhadap kesehatan seseorang dalam acara publik., maka visum et repertum mempunyai peran sebagai berikut :

Sebagai alat bukti yang sah

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.

Bukti penahanan tersangka

Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti- bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

Visum et Repertum tidak dianggap sebagai dokumen hukum, melainkan materi dari non-pidana, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk dokumen hukum yang disusun dan diadministrasikan oleh dokter, sehingga berfungsi sebagai dokumen legal yang membela dokumen tersebut.

Digunakannya visum et rapertum sebagai alat bukti di pengadilan maka sangat diharapkan dapat menekan dan mengurangi terjadinya tindak pidana di Masyarakat.

4.4. Pembahasan

Menurut teori hukum pidana, tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan keadilan. Laboratorium forensik memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini dengan menyediakan bukti yang valid dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Teori pembuktian menekankan pentingnya bukti ilmiah yang dihasilkan melalui metode yang benar untuk meningkatkan keandalan proses peradilan.

Berbagai metode analisis forensik yang digunakan, seperti GC-MS dan PCR, mencerminkan prinsip-prinsip dasar teori ilmu pengetahuan. Laboratorium forensik menerapkan pendekatan empiris untuk menguji dan menganalisis bukti secara sistematis, sejalan dengan prinsip-prinsip teori empirisme yang menekankan pentingnya pengamatan dan eksperimen.

Laboratorium forensik juga dapat dipahami melalui teori organisasi, terutama Teori Sistem Terbuka. Teori ini menyatakan bahwa organisasi, termasuk laboratorium forensik, dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti teknologi, regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia. Laboratorium forensik harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal ini untuk bertahan dan berkembang.

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh laboratorium forensik, seperti keterbatasan peralatan dan kurangnya tenaga ahli, mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dan mengembangkan kapabilitasnya. Pendekatan sistem terbuka menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan adaptasi dalam menghadapi kendala tersebut. Dengan demikian, teori organisasi membantu memahami bagaimana laboratorium forensik beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Laboratorium forensik juga memberikan kontribusi terhadap teori kepercayaan publik. Melalui penyediaan bukti ilmiah yang kuat, laboratorium forensik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada fakta yang akurat, bukan pada spekulasi atau asumsi yang tidak berdasar, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Integrasi antara teori dan praktik dalam laboratorium forensik menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip teoritis diterapkan secara langsung dalam situasi nyata untuk mencapai hasil yang efektif. Laboratorium forensik memainkan peran krusial dalam berbagai aspek, termasuk identifikasi pelaku, rekonstruksi kejadian, analisis bahan bukti, dan pemulihan data digital. Semua kegiatan ini mencerminkan penerapan teori-teori ilmiah dan hukum dalam praktik sehari-hari.

Penerapan teori ilmiah dalam laboratorium forensik membantu memastikan bahwa metode yang digunakan untuk menganalisis bukti adalah berdasarkan pengetahuan yang teruji dan terbukti efektif. Dengan memanfaatkan teori-teori ini, laboratorium forensik dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengungkap tindak pidana dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap sistem peradilan. Misalnya, teori-teori analisis bahan bukti membantu dalam menentukan asal-usul dan keaslian barang bukti, sementara prinsip-prinsip hukum memastikan bahwa proses analisis dan penanganan bukti mematuhi standar yang berlaku.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan ilmiah dan teoritis dalam laboratorium forensik. Teori-teori ini tidak hanya relevan

tetapi juga esensial untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Dengan menggabungkan pengetahuan teoritis dengan praktik laboratorium yang cermat, laboratorium forensik dapat terus memperbaiki metode dan tekniknya, sehingga memperkuat keakuratan dan keandalan hasil analisis yang diberikan kepada sistem peradilan. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih adil dan efektif, serta membantu dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kriminal dengan lebih baik.

Referensi

- Abdissalam, R. Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri. Dinas Hukum Polri. Jakarta.
- Atmojo, Sri. 2008. Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi di POLRES Klaten): Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Pertama.
- Bawengan, W. Gerson.1997. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 1992. Pure Theory. Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press.
- Kunarto. 1997. Perilaku Organisasi Polri. Jakarta. Cipta Manunggal. Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2000. Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi cetakan ke II. Jakarta.
- MABESPOLRI. 2002. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRIDi Lapangan. Jakarta: MABESPOLRI.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum (suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. Kamus Hukum. Semarang. Aneka Ilmu. Prof.H.R. Abdussalam,SIK,S.H,M.H , Desafuyanto Adri,SH,MH., 2013.
- Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah), Jakarta : PTIK Press R, Meryk Dewi. 2008.
- Peranan Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi di POLRESTA Malang): Universitas Muhammadiyah Malang.
- Simorangkir, J. C. T. Erwin, T. Rudy dan Preasetyo, J. T. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- W, A, Soeherto. 2002. Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia